

**PENGARUH BELANJA MODAL, UKURAN PEMERINTAH DAERAH,
INTERGOVERNMENTAL REVENUE DAN PENDAPATAN ASLI
DAERAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN
(Kabupaten/ Kota Di Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2012-2015)**

Sri Mulyani
Hardiyanto Wibowo
Universitas Muhammadiyah Purwokerto
Srim85wy@gmail.com

ABSTRACT

The study aims to examine the effect of capital expenditures, the intergovernmental revenue, the size of capital government and local revenues to financial performance. The dependent variable applied in the research was financial performance as measured by the efficiency ratio, while the independent variable was capital expenditure, intergovernmental revenue, the size of local government and local revenues. The population in this study was a local government district / city in central java province in 2012-2015. The sample in the study was selected by census method, and the data obtained were 105 sample observations. The analysis technique used in this research was multiple linear regression analysis. Results of the analysis proved that the capital expenditure variable significantly and positively affected on the financial performance of local government district/ city of Central Java province. While intergovernmental revenue, the size of local government and local revenue variables significantly and negatively affected on the financial performance of local government district/ city of Central Java province.

Keywords : *financial performance, capital expenditure, intergovernmental revenue, the size of local government and local revenues*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh belanja modal, *intergovernmental revenue*, ukuran pemerintah daerah dan pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan. Variabel dependenyang digunakan dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan yang diukur dengan rasio efisiensi, sedangkan variabel independennya adalah belanja modal, *intergovernmental revenue*, ukuran pemerintah daerah dan pendapatan asli daerah. Populasi dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2012-2015. Sampel dalam penelitian ini menggunakan metode sensus, dan diperoleh data sebanyak 105 sampel amatan. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel belanja modal berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan Variabel *intergovernmental revenue*, ukuran pemerintah daerah dan pendapatan asli daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah.

Kata Kunci : Kinerja keuangan, belanja modal, *intergovernmental revenue*, ukuran pemerintah daerah dan pendapatan asli daerah

PENDAHULUAN

Krisis ekonomi di Indonesia memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kondisi perekonomian dan menuntut pemerintah agar mampu melaksanakan reformasi di segala bidang. Hal ini mendorong pendelegasian sebagai wewenang pemerintah pusat untuk pengelolaan keuangan kepada daerah, agar daerah mampu membiayai pembangunan dan pelayanan atas dasar keuangan sendiri. Selain hal tersebut, pemerintah daerah ingin memberikan pelayanan yang lebih berorientasi pada kepuasan masyarakat serta kebutuhan dan keinginan rakyat mengenai kinerja pemerintah daerah semakin besar dan kritis.

Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah seperti tertuang dalam UU No.32/2004 pasal 1 angka 5 menyebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk menyelenggarakan wewenangnya, pemerintah daerah diberi keleluasaan untuk menggali sumber penerimaan berupa pendapatan sendiri yang berasal dari potensi yang ada di daerah. Kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan. Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja di masa

lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi kinerja yang akan berlanjut (Nugroho, 2012). Menurut Halim (2008) dalam Nugroho (2012) analisis keuangan adalah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Dalam organisasi pemerintah untuk mengukur kinerja keuangan ada beberapa ukuran kinerja, yaitu derajat desentralisasi, ketergantungan keuangan, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio kesersian dan pertumbuhan (Sularso & Resianto, 2011) dalam Nugroho (2012).

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis apakah secara persial belanja modal, ukuran pemerintah daerah, *intergovernmental revenue* dan pendapatan asli daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan.

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Dalam hubungan keagenan, terdapat dua pihak yang melakukan kesepakatan atau kontrak, yakni pihak yang memberikan wewenang atau kekuasaan (prinsipal) dan yang menerima kewenangan (agen). Dalam suatu organisasi hubungan ini berbentuk vertikal, yakni antara pihak atasan (sebagai prinsipal) dan pihak bawahan (sebagai agen). Teori tentang hubungan kedua pihak tersebut populer dikenal sebagai teori keagenan. Hubungan keagenan lebih sering dibahas dalam konteks manajemen perusahaan yang berorientasi bisnis. Teori yang menjelaskan hubungan prinsipal dan agen ini salah satunya berakar pada teori ekonomi, teori keputusan, sosiologi dan teori organisasi.

Teori kontingensi

Pendekatan kontijensi pada akuntansi didasarkan pada premis bahwa tidak ada sistem akuntansi secara universal selalu tepat untuk bisa diterapkan pada seluruh organisasi dalam setiap keadaan, tetapi dipengaruhi juga oleh faktor-faktor situasional yang ada dalam organisasi (Hanu, 2006). Adopsi teori kontijensi pada akuntansi muncul sebagai suatu kebutuhan untuk menginterpretasikan hasil riset empiris (Hanu, 2006). Penelitian yang menggunakan pendekatan kontijensi dilakukan, dengan tujuan mengidentifikasi berbagai variabel kontijensi yang memengaruhi perancangan. Hakikat teori

kontijensi adalah tidak ada satu cara terbaik yang bisa digunakan dalam semua keadaan (situasi) lingkungan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu dengan analisis data bersifat kuantitatif/ statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2012:13). Penguji dapat mengidentifikasi fakta atau peristiwa mengenai kinerja keuangan sebagai variabel yang dipengaruhi (variabel dependen) dan melakukan penyelidikan mengenai variabel-variabel yang mempengaruhi antara lain: belanja modal, ukuran pemerintah daerah, *Intergovernmental revenue* dan pendapatan asli daerah (variabel independen).

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah kabupaten / kota di provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2012-2015. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan realisasi anggaran pemerintah daerah dari kabupaten dan kota di provinsi Jawa Tengah yang tersedia tahun 2012-2015 dan metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan sensus. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen dengan cara mengumpulkan data sekunder dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah 2012-2015.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja dibidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah yang menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama periode anggaran. Dalam penelitian ini, kinerja keuangan diprosikan menggunakan rasio efisiensi. Rasio efisiensi yaitu alat analisis yang berguna untuk mengukur efisiensi biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Pengukuran kinerja pemerintah daerah diukur dengan menilai efisiensi atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat Sumarjo (2010) dalam (sesotyangingtyas, 2012). Dalam variabel ini, peneliti menggunakan rasio efisiensi untuk menghitung kinerja keuangan pemerintah daerah. Semakin tinggi

rasio efisiensi maka semakin buruk kinerja. Sedangkan semakin rendah rasio efisiensi menunjukkan kinerja yang baik. Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah diukur dengan rumus:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Total Realisasi pengeluaran}}{\text{Total Ralisasi Penerimaan}}$$

Belanja Modal

Menurut PP Nomor 71 tahun 2010 belanja modal merupakan belanja langsung yang digunakan untuk membiayai kegiatan investasi (aset tetap). Variabel ini diukur melalui besarnya target alokasi belanja daerah Kabupaten/Kota pada setiap tahun anggaran. Belanja modal diukur dengan menggunakan rumus :

$$\text{BM} = \text{Belanja Tanah} + \text{Peralatan dan Mesin} + \text{Gedung dan Bangunan} + \text{Jalan, Irigasi dan Jaringan} + \text{Aset tetap lainnya} + \text{Konstruksi Dalam Pengerjaan} + \text{Aset Lainnya}$$

Ukuran Pemerintah Daerah

Peneliti menggunakan proksi populasi penduduk karena setiap provinsi mempunyai jumlah penduduk yang berbeda dan jumlah anggarannya, hal ini menjadi permasalahan dalam memajukan wilayahnya berdasarkan indikator jumlah penduduk. Maka pada penelitian ini Ukuran pemerintah daerah diukur dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{UPD} = \frac{\text{Pendapatan (Pusat + Daerah)}}{\text{Jumlah Penduduk}}$$

Intergovernmental Revenue

Dana perimbangan sesuai UU No.32/2004 dan UUNo.33/2004 terdiri dari Dana alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Maka pada penelitian ini *Intergovernmental Revenue* diukur dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Dana Perimbangan} = \text{Dana Bagi Hasil} + \text{Dana Alokasi Umum} + \text{Dana Alokasi Khusus}$$

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah dalam penelitian ini dihitung dengan rasio pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan yang mencerminkan porsi pendapatan asli daerah dalam pendapatan daerah. Pendapatan asli daerah adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Mardiasmo, 2001). Maka pada penelitian ini variabel pendapatan asli daerah diukur dengan rumus :

$$\text{PAD} = \text{Pajak Daerah} + \text{Retribusi Daerah} + \text{Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah} + \text{Lain-lain PAD yang Sah}$$

HIPOTESIS PENELITIAN

Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan

Sudarsana (2013) menyatakan bahwa belanja modal yang besar merupakan cerminan dari banyaknya infrastruktur dan sarana yang dibangun. Sehingga semakin banyak pembangunan yang dilakukan akan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga kinerja daerah akan lebih baik. Hal tersebut menunjukkan, semakin tinggi belanja modal maka akan semakin tinggi kinerja keuangan yang diukur dari rasio efisiensi. Rasio efisiensi yang semakin tinggi mengidentifikasi kinerja yang buruk.

H_1 : Belanja modal berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan

Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan

Sudarsana (2013) menjelaskan tujuan utama dari pemda adalah memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan sumberdaya dan fasilitas yang memadai untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, semakin besar ukuran daerah yang ditandai dengan besarnya jumlah penduduk, maka diharapkan akan semakin tinggi kinerja Pemda tersebut. Sehingga ukuran pemerintah yang besar maka kinerja keuangan semakin tinggi yang diukur dengan rasio efisiensi. Rasio efisiensi yang semakin tinggi mengidentifikasi kinerja keuangan yang buruk.

H_2 : Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh *Intergovernmental Revenue* terhadap Kinerja Keuangan

Pemberian dana perimbangan ini akan dipantau penggunaannya oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu, semakin besar dana perimbangan maka pengawasan dari pemerintah pusat semakin ketat sehingga diharapkan akan membuat pemerintah daerah akan semakin berhati-hati dalam melaksanakan program kerjanya. Hal ini akan mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerjanya sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangannya karena sumber keuangannya berasal dari pihak eksternal. Semakin besar dana perimbangan maka pengawasan dari pemerintah pusat semakin ketat sehingga diharapkan akan membuat pemerintah daerah akan semakin berhati-hati dalam pelaksanaan program kerjanya. Dengan demikian, semakin besar dana perimbangan akan membuat kinerja keuangan pemerintah daerah semakin baik. Hal ini menunjukkan semakin besar dana perimbangan maka akan semakin tinggi kinerja keuangan yang diukur dengan rasio efisiensi. Rasio efisiensi yang semakin tinggi, mengidentifikasi kinerja yang buruk.

H_3 : *Intergovernmental Revenue* berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan

Pengaruh PAD terhadap Kinerja Keuangan

Julitawati (2012) menyatakan bahwa kemampuan suatu daerah dalam menggali PAD akan mempengaruhi perkembangan dan pengembangan daerah tersebut. Disamping itu semakin besar kontribusi PAD terhadap APBD, maka akan semakin kecil pula ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat. Sumarjo (2010) menjelaskan bahwa peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan faktor pendukung dari kinerja ekonomi makro. Hal tersebut menunjukkan, semakin besar PAD maka akan semakin tinggi kinerja keuangan yang diukur dari rasio efisiensi. Rasio efisiensi yang semakin tinggi mengidentifikasi kinerja yang buruk.

H_4 : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Regresi Berganda

Berdasarkan tabel 4.6 uji t diatas, pengujian hipotesis dapat diformulasikan dalam model persamaan regresi berganda variabel independen terhadap variabel dependen sebagai berikut:

$$KK : 0,939 + 0,000000 BM -0,000014 UPD -0,000000 IR -0,000000 PAD + e$$

PEMBAHASAN

Hasil Pengujian Hipotesis Pertama

Berdasarkan hasil penelitian variabel belanja modal menunjukkan nilai t sebesar 0,000000 dengan arah positif dan nilai signifikansi 0,006 kurang dari 0,05 sehingga menunjukkan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak. Hipotesis pertama yang menyatakan belanja modal berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan **ditolak**. Hal ini menunjukkan variabel belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Artinya belanja modal rendah maka rasio efisiensi yang dihasilkan tinggi, hal ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan baik.

Hasil Pengujian Hipotesis Kedua

Berdasarkan hasil penelitian variabel ukuran pemerintah daerah menunjukkan nilai koefisien -0,000014 dengan arah negatif dan memiliki nilai signifikansi 0,000 kurang dari 0,05 sehingga menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Maka, hipotesis kedua yang menyatakan ukuran pemerintah daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan **diterima**. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan. Artinya, ukuran pemerintah daerah yang tinggi maka rasio efisiensi yang dihasilkan rendah.

Hasil Pengujian Hipotesis Ketiga

Berdasarkan hasil penelitian variabel *intergovernmental revenue* menunjukkan nilai koefisien -0,000000 dengan arah negatif dan memiliki nilai signifikansi 0,000 kurang dari 0,05 sehingga menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Maka, hipotesis ketiga yang menyatakan *intergovernmental revenue* berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan **diterima**. Hal ini menunjukkan bahwa

intergovernmental revenue berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan. Artinya, *Intergovernmental revenue* yang semakin besar maka rasio efisiensi yang dihasilkan semakin rendah.

Hasil Pengujian Hipotesis Keempat

Berdasarkan hasil penelitian variabel pendapatan asli daerah menunjukkan nilai koefisien -0,000000 dengan arah negatif dan memiliki nilai signifikansi 0,009 kurang dari 0,05 sehingga menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Maka, hipotesis keempat yang menyatakan pendapatan asli daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan **diterima**. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan. Artinya, dengan pendapatan yang besar maka rasio efisiensi yang dihasilkan semakin rendah.

KESIMPULAN

Berdasarkan perumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh negatif signifikan belanja modal, ukuran pemerintah daerah, *intergovernmental revenue* dan pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan kota dan kabupaten di Provinsi Jawa Tengah dapat disimpulkan sebagai berikut, belanja modal berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pada kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2012-2015. Ukuran pemerintah daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pada kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2012-2015. *Intergovernmental revenue* berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pada kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2012-2015. Pendapatan asli daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pada kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2012-2015.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang pelayanan publik dan kinerja pemerintahan daerah khususnya dari belanja modal, ukuran pemerintah daerah, *intergovernmental revenue* dan pendapatan asli daerah di Provinsi Jawa Tengah tahun amatan 2012-2015.

Saran untuk penelitian selanjutnya, menambahkan variabel yang diperkirakan ada pengaruhnya terhadap kinerja keuangan dan populasi lainnya yang terdapat di Indonesia yang belum dijadikan sampel dalam penelitian ini

serta dapat menambah tahun pengamatan agar dapat diketahui variasi yang terjadi pada kabupaten/kota yang akan memberikan kontribusi hasil penelitian yang lebih tepat dan akurat di masa mendatang. Memperluas objek penelitian dan menambah tahun amatan. Untuk mengukur kinerja keuangan daerah selain menggunakan rasio efisiensi juga bisa menggunakan rasio efektifitas, rasio kemandirian dan yang lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- BPK (Badan Pemeriksa Keuangan).2016.Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
- BPS (Badan Pusat Statistik).2016.Jumlah Penduduk Jawa Tengah.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Mardiasmo. 2001. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Sesotyaningtyas, Mirna. "*Pengaruh Leverage, Ukuran Legislatif, dan Ingovernmental revenue Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa*". Skripsi. Semarang: Unnes.
- Simanullang, Gideon. 2013. *Pengaruh Belanja Modal, Intergovermental, Revenue Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kota Dan Kabupaten Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2008-2012*. Umarah Journal Of Accounting Vol. 1 No. 1, Tahun 2013 Halaman 1-24.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah*. 2009. Jakarta: Salemba Empat.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah*. 2009. Jakarta: Salemba Empat.